BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menemukan Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Otopsi merupakan tindakan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dengan cara membedah mayat untuk mencari dan menemukan penyebab dari suatu kematian yang diduga tidak wajar yang dilakukan oleh dokter ahli forensik melalui permintaan penyidik yang disampaikan secara formal melalui prosedur hukum yang berlaku. Otopsi sangat diperlukan guna mencari kebenaran materil suatu kematian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Putusan nomor 490/Pid.B/2018/PN Jmb tidak mencerminkan tujuan dari hukum acara pidana dikarenakan adanya proses otopsi yang dilakukan hanya otopsi luar saja, beda halnya dengan putusan nomor 241/Pid.B/2021/PN Jmb yang dilakukan dengan profesional tepat dan sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana serta isu hukum pada penelitian ini jelas dan tepat mengenai kekaburan hukum, dimana dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) kurang tegas dan jelas mengenai tindakan penyidik dan visum tidak terpaparkan secara jelas, hanya di atur dalam pasal 133-136 KUHAP.

B. Saran

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta jajaran hendaknya memperjelas aturan mengenai tindakan penyidik dan pada proses visum. Penyidik harusnya dituntut bijak dan tegas dalam melakukan penyidikan sebab kematian, pada pasal 133-136 KUHAP diberikan kewenangan kebijakan ke penyidik, malah dijadikan alasan dan meremehkan proses acara pidana. Pihak kedokteran juga dituntut profesional dalam melakukan otopsi dalam, tidak bisa dilakukan pemeriksaan luar saja pada kasus pembunuhan berencana dikarenakan pentingnya otopsi dalam pada proses pembuktian tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa manusia. Pasal 133-136 KUHAP dikasih kebijakan ke penyidiknya malah dijadikan alasan mereka kalau tidak ada ketentuan tegas untuk itu, malah diremeh remehkan proses acara pidananya.